

## Daftar Pustaka

- Abdul Latif, 2005. *Hukum dan Peraturan Kebijakan (beleidsregel) Pada Pemerintahan Daerah*, UII Press, Yogyakarta.
- Achmad Ali, 2013. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenadamedia Group, Cetakan Ke-5, Jakarta.
- Aminuddin Ilmar, 2018. *Hukum Tata Pemerintahan*, cetakan ke-3, Prenadamedia Group, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2014. *Membangun Negara Hukum Indonesia*, Phinatama Media, Makassar.
- Andi Pangerang Moenta dan Syafa'at Anugrah Pradana, 2018. *Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah*, PT Raja Grafindo Persada, Depok.
- Ani Sri Rahayu, 2018. *Pengantar Pemerintahan Daerah” Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya”*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Armen Yasir, 2007. *Hukum Perundang-undangan*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Dadang Suwanda, 2016. *Peningkatan Fungsi DPRD Dalam Penyusunan Perda yang Progresif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Fadli Andi Natsif, 2018. *Ketika Hukum Berbicara*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Fitra Arsil, 2017. *Teori Sistem Pemerintahan: Pergeseran Konsep dan Saling Kontribusi Antar Sistem Pemerintahan Di Berbagai Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Depok.
- G. Marshall, 1971. *Constitutional Theory*, Oxford Univercity Press, Clarendon.
- Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, 2013. *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, cetakan ke-3.

- Jamaluddin Ghafur dan Allan Fatchan Gani Wardhana, 2019. *Presidential Threshold” Sejarah, Konsep dan Ambang Batas Persyaratan Pencalonan Dalam Tata Hukum di Indonesia “*, Setara Press, Malang.
- Jimly Ashsiddiqie, 2005. *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT RajaGrafindo Persada, cetakan ke-5, Jakarta.
- J. Kaloh, 2007. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah” Suatu Solusi dalam menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- John Alder and Peter English, 1989. *Constitutional and Administrative Law*, Macmillan, London.
- Josef Mario Monteiro, 2016. *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*, Pustaka Yustisia, Jakarta.
- Lawrence W. Friedman, 1984. *American Law: An invaluable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily our daily lives*, W.W. Norton & Company, New York.
- Leo Agustino, 2009. *Pilkada Dan Dinamika Politik Lokal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wiyasa Putra, 2003. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Michael T. Molan, 2003. *Constitutional Law: Machinery of Government*, 4<sup>th</sup> edition, Old Bailey Press, London.
- Miriam Budiarjo, 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, edisi revisi, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2002. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*, Alumni, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1995. *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta, Bandung.
- Mochtar Mas’oed, 1999. *Negara Kapital dan Demokrasi*, cetakan kedua, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

- M. Rifqinizamy Karsayuda, 2015. *Partai Politik Lokal Untuk Indonesia “Kajian Yuridis Ketatanegaraan Pembentukan Partai Lokal di Indonesia Sebagai Negara Kesatuan”*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Mustamin Dg. Matutu, dkk, 2004. *Mandat, Delegasi, Atribusi, dan Implementasinya di Indonesia*, Tim Ull Press, Yogyakarta.
- M. Solly Lubis, 2008. *Hukum Tata Negara*, CV. Bandar Maju, Bandung.
- Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, 2017. *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Kencana, Jakarta.
- O. Hood Phillips, Paul Jackson, and Patricia Leopold, 2001. *Constitutional and Administrative Law*, sweet & Maxwell, London.
- Otje Salman dan Eddy Damian (ed), 2002. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja*, Penerbit PT.Alumni, Bandung.
- Pataniari Siahaan, 2012. *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*, Kostitusi Press, Jakarta.
- Saidah, 2016. *Pengantar Pendidikan” Telaah Pendidikan Secara Global dan Nasional”*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Saifullah, 2018. *Dinamika Teori Hukum “Sebuah Pembacaan Kritis Paradigmatik”*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Scott Mainwaring, 1999. *Presidensialism, Multiparty System, and Democracy: The Difficult Equation*, Work Paper.
- Shidarta, 2006 *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan*, CV Utomo, Jakarta.
- Sigit Pamungkas, 2012, *Partai Politik: Teori dan Praktik di Indonesia*, Institute for Democracy and Welfarism, Yogyakarta.
- Siswanto Susarno, 2006. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soehino, 2005. *Ilmu Negara*, Liberty, Cetakan ke-7, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 2007. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Suharizal dan Muslim Chaniago, 2017. *Hukum Pemerintahan Daerah Setelah Perubahan UUD 1945*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Syaukani HR. dkk, 2003. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- The Liang Gie, 1993. *Pertumbuhan Pemerintah Daerah di Negara Republik Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Wery Gusmansyah., 2017 *Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Dalam Perspektif siyasah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Yuliandri, 2009. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik (Gagasan Pmebentukan Undang-Undang Berkelanjutan)*, RajaGrafindo, Jakarta.
- Yusnani Hasyimzoem dkk, 2018. *Hukum Pemerintahan Daerah*, Cetakan ke-2, Rajawali Pers, Depok.

### **Karya Ilmiah**

- Andi Bau Inggit, A. Pangerang Moenta, Marwati Riza, Hamzah Halim, 2017 *Local regulation Review in Realizes Legal Order of the Local Governance*, Journal of Law, Policy and Globalization, ISSN 2224-3240 (Paper) ISSN 2224-3259 (Online), Vol 59.
- Andi Pangerang Moenta, 1999. *Prinsip Permusyawaratan Rakyat dan Implementasinya dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Ardin, Aminuddin ilmar, Sukarno Aburaera, Marthen Arie, 2016. *Legal Status of The Election Organizer Ethics Council: An Anlysis of Indonesian Election System*, International Journal of Scientific & Technology Research, Volume 5, Issue 02, ISSN 2277-8616.
- Ateng Syafruddin, 2000. *Menuju Pemerintahan Negara Yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justitia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung.
- Gunawan Arifin, Andi Pangerang Moenta, Muh Guntur, Muh Hasrul, 2018. *The Essence of the Presidential Election as a Political Education System*, Journal of Law, Policy and Globalization, ISSN 2224-3240 (Paper) ISSN 2224-3259 (Online) Vol. 79.

- Hamid Hussein, Marwati Riza, Andi Pangerang Moenta, Anshori Ilyas, 2018. *Implementation of Functions of Political Party in Indonesian Constitutional Systems*, Journal of Law, Policy and Globalization ISSN 2224-3240 (Paper), ISSN 2224-3259 (Online), Vol 80.
- Lucia Ch.O. Tahamata, Muhammad Ashri, Marwati Riza, Aminuddin Salle, 2019. *A Human Right-Based Approach to Education: Rule of Local government*, Journal of Law, Policy and Globalization, ISSSN 2224-3240 (Paper) ISSSN 2224-3259 (Online) Vol 85.
- Marcus Priyo Gunarto, 2011. *Kriminalisasi dan Penalisasi dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
- Markus Lukman, 1997. *Eksistensi Peraturan Kebijakan Dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah Serta Dampaknya Terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional*, Disertasi, Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung.
- M. Yeti Andrias, Marthen Arie, Faisal Abdullah, A.M. Yunus Wahid, 2016. *The Esence of Law of Community's Participation in the Local Development Planning Papua*, Journal of Law, Policy and Globalization, ISSN 2224-3240 (Paper) ISSN 2224-3259 (Online), Vol.46.
- Ratna Dewi Pettalolo, Aminuddin Ilmar, Andi Pangerang Moenta, Anwar Borahima, *The Nature of General Election Supervisory Board (Bawaslu) as the Guardian of the People's Sovereignty*, International Policy Review, E-ISSN 1088-7326 Vol. 2, No. 11, 2016.
- Septi Wahyu Sandiyoga, *Efektivitas Peraturan Walikota Makassar Nomor 64 Tahun 2011 tentang Kawasan Bebas Parkir di Lima Ruas Bahu Jalan Kota Makassar*, Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2015.
- Syafa'at Anugrah Pradana, andi Pangerang Moenta, Marwati Riza, Muh Hasrul, *Constructing A Legal Concept of Secondary Education Management in Indonesia*, Journal of Law, Policy and Globalization ISSN 2224-3240 (Paper) ISSN 2224-3529 (Online), Vol. 89, 2019.

## **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah.

Peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kabupaten Pendidikan.

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa Nomor: 28/XI/Tahun 2019 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Gowa Tahun 2020.

## **Internet**

[https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload\\_file/img/article/doc/kajian\\_deskriptif\\_analitis\\_teor\\_i\\_hukum\\_pembangunan.pdf](https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/kajian_deskriptif_analitis_teor_i_hukum_pembangunan.pdf) di akses tanggal 19 Maret 2021.